

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Rilo Jatitmas

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: rilojatitmas@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the significance of the influence of local financial independence ratio, the ratio of the area of financial effectiveness and financial efficiency ratios area partially or simultaneously to the allocation of capital expenditure on district / city in Central Java province Period 2011 - 2013. To analyze the influence of the dominant variable (the ratio of the area of financial independence, financial effectiveness ratio of regional or local financial efficiency ratio) of the capital expenditure on district / city in Central Java province Period 2011 - 2013. The results were obtained conclusion: There is a positive and significant effect of the ratio of the area of financial independence of the allocation of capital expenditure on district / city in Central Java province Period 2011 - 2013. There is a positive and significant effect of the ratio of the area of financial effectiveness of the allocation of capital expenditure on district / city in Central Java province Period 2011 - 2013. There is a positive and significant influence local financial efficiency ratio for capex at Regency / City in Central Java province Period 2011 - 2013. The results of the F test analysis we concluded there was a significant effect of local financial independence ratio, the ratio of the area of financial effectiveness and financial efficiency ratios regions simultaneously on the dependent variable, namely capex at Regency / City in Central Java province Period 2011 - 2013.

Keywords: *financial independence ratio of local, regional financial effectiveness ratio, the ratio of the area of financial efficiency and capex*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan di era reformasi saat ini, mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga publik di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai *variable* lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu indikator yang mempengaruhi alokasi belanja modal pada penelitian ini adalah Rasio keuangan daerah yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi keuangan daerah (Vella Kurniasih Fitri, 2014: 3). Analisis rasio keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Abdul Halim, 2008: 42).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah, sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik (Ardhini, 2011). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah (Mahmudi, 2010: 26).

Untuk Rasio Keuangan Efektivitas daerah adalah dengan cara membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan (Ardhini, 2011). Sehingga kemampuan dan efektivitas keuangan daerah dalam merealisasikan PADnya akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan manajemen keuangan daerah (Havid Sularso,dkk, 2011: 22).

Rasio Keuangan Efisiensi Daerah adalah dengan membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi (Vella Kurniasih Fitri, 2014: 3). Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan, jika nilai efisiensi tinggi maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Vella Kurniasih Fitri (2014) menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, tingkat efektivitas berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Havid Sularso (2011) bahwa rasio kemandirian dan efektivitas berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Vella Kurniasih Fitri (2014) menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Havid Sularso (2011) bahwa rasio kemandirian dan efektivitas berpengaruh terhadap belanja modal.

Perbedaan lainnya dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada periode penelitian dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Vella Kurniasih Fitri (2014) periode penelitiannya adalah tahun 2009 - 2012, dengan objek penelitian yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sedangkan dalam penelitian ini periode penelitian yang digunakan adalah periode terbaru yaitu periode 2011 - 2013 dan sebagai objek penelitiannya adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikansi pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Untuk menganalisis variabel yang dominan pengaruhnya (rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah atau rasio efisiensi keuangan daerah) terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011 - 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan penelitian sensus.

Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

(Abdul Halim, 2008: 234)

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas adalah perbandingan antara penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas keuangan daerah diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

(Abdul Halim, 2008: 234)

3. Rasio efisiensi keuangan daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio efektivitas keuangan daerah diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

(Abdul Halim, 2008: 234)

4. Alokasi Belanja Modal

Alokasi belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Alokasi belanja modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi/anggaran belanja modal pemerintah kabupaten dan kota yang terdapat dalam APBD (anggaran) dengan formulasi:

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja daerah}} \times 100\%$$

(Mochamad Fajar Hidayat, 2013: 10)

Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS.
- b. Uji Autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.
- c. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
- d. Uji Normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmo-gorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 1 berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	Tolerance (0,837); (0,726); (0,750) > 0,1 VIF (1,195); (1,377); (1,334) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji Autokorelasi	p (0,171) > 0,05	Tidak ada Autokorelasi
Uji heteros-kedastisitas	P (0,844); (0,421); (0,768) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Normalitas	p (0,945) > 0,05	Residual normal

Sumber: Pengolahan data sekunder 2014

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (X_1), rasio efektivitas keuangan daerah (X_2) dan rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y).

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig.
(Constant)	-130,645	-3,898	0,000
Kemandirian keuangan daerah (X_1)	0,495	2,753	0,010
Efektivitas keuangan daerah (X_2)	0,955	2,679	0,012
Efisiensi keuangan daerah (X_3)	0,618	3,012	0,005

R Square = 0,640
Adjusted R Square = 0,605
F-hitung = 18,357
Sig. F = 0,000

Sumber: Data penelitian diolah 2015

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = -130,645 + 0,495X_1 + 0,955X_2 + 0,618X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah :

- a : -130,645 artinya jika rasio kemandirian keuangan daerah (X_1), rasio efektivitas keuangan daerah (X_2) dan rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) sama dengan nol, maka Alokasi belanja modal (Y) adalah negatif sebesar Rp. 130,645.
- b_1 : 0,495 artinya pengaruh variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 positif, artinya apabila rasio kemandirian keuangan daerah meningkat, maka dapat meningkatkan Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013, dengan asumsi variabel rasio efektivitas keuangan daerah (X_2) dan rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) dianggap tetap.
- b_2 : 0,955 artinya pengaruh variabel rasio efektivitas keuangan daerah (X_2) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 positif, artinya apabila rasio efektivitas keuangan daerah meningkat, maka dapat meningkatkan Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013, dengan asumsi variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) dan rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) dianggap tetap.
- b_3 : 0,618 artinya pengaruh variabel rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 positif, artinya apabila rasio efisiensi keuangan daerah meningkat, maka dapat meningkatkan Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013, dengan asumsi variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) dan rasio efektivitas keuangan daerah (X_2) dianggap tetap.

Dari analisis tersebut, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 adalah variabel rasio efektivitas keuangan daerah (X_2), karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu 0,955 di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain (rasio kemandirian keuangan

daerah (X_1) sebesar 0,495, rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) sebesar 0,618. Sehingga hipotesis ke-5 yang berbunyi: “Rasio efektivitas keuangan daerah merupakan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

Adapun hasil analisis uji t adalah:

- a. Pengujian signifikansi pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 adalah sebagai berikut:

Karena *probability value* sebesar $0,010 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013.

- b. Pengujian signifikansi pengaruh rasio efektivitas keuangan daerah (X_2) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 adalah sebagai berikut :

Karena *probability value* sebesar $0,012 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan rasio efektivitas keuangan daerah (X_2) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013.

- c. Pengujian signifikansi pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 adalah sebagai berikut:

Karena *probability value* sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013.

3. Uji F

Hasil analisis diperoleh *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (X_1), rasio efektivitas keuangan daerah (X_2) dan rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013.

4. Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,605 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (X_1), rasio efektivitas keuangan daerah (X_2) dan rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 sebesar 60,5 persen sedangkan sisanya $(100\% - 60,5\%) = 39,5$ persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

KESIMPULAN

Pengujian signifikansi pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Pengujian signifikansi pengaruh rasio efektivitas keuangan daerah terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan rasio efektivitas keuangan daerah terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Pengujian signifikansi pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 diperoleh diperoleh hasil

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013.

Hasil analisis uji F menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Variabel yang dominan pengaruhnya terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 adalah variabel rasio efektivitas keuangan daerah, karena nilai koefisien regresinya paling besar di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain. Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,605 berarti diketahui bahwa sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 sebesar 60,5 persen sedangkan sisanya $(100\% - 60,5\%) = 39,5$ persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Abdullah, 2008, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No. 2 Tahun 2008.
- Arja Sadjiarto, 2000, Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Volume 2, No. 2, Nopember 2000, Hal. 138 – 150.
- Bisnis.com, 2013, *Menggenjot Belanja Modal*, Media Indonesia Edisi 02 Maret 2013.
- Dora Detisa, 2009, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah Khusus pada Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam, *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2006, *Statistik Induktif*, BPFE, Yogyakarta.
- Harun Hamrolie, 2003, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Havid Sularso,dkk, 2011, Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, *Media Riset Akuntansi*, Vol.1, No.2, ISSN 2088-2106, Agustus 2011.
- Hendarmin, 2012, Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal EKSOS*, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012, Hal 144-155.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2007, *Manajemen Publik*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- <http://jateng.bps.go.id/>
- Imam Ghozali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indra Bastian, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPP STIM. YKPN, Yogyakarta.
- Mochamad Fajar Hidayat, 2013, Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ronald dan Sarmiyatiningsih, 2009, Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. *Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 1 No.1, Juni 2010, 31-42
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserarch*, BPFE, Yogyakarta.
- Syaiful, 2008, *Belanja Barang dan Belanja Modal dalam kaidah akuntansi Pemerintah*, Tim Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.